



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PT PUPUK INDONESIA (PERSERO), PT PENGEMBANGAN PARIWISATA
INDONESIA, PT ANEKA TAMBANG, TBK., DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SERTA DEPUTI KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RESIKO KEMENTERIAN BUMN
LABUAN BAJO, NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 5 JUNI 2023 – 7 JUNI 2023
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Deputy Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputy Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 – 7 Juni 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET. BAKN
11.	--	PARID, S.E.	KASUBBAG SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
13.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
14.	--	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	NOVRIANSYAH, S.H.,M.H.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	AKBAR PRAYOGA	TV PARLEMEN
17.	--	DEVI IRIANDI, SH.	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN dihadiri oleh:

1. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
2. Kepala Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara
3. Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara
4. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung
5. Koordinator pada Keasdepan Industri Pangan dan Pupuk
6. Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero)
7. Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Iskandar Muda
8. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Aneka Tambang, Tbk.
9. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC
10. Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Resiko PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC
11. Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC

Pada pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

DJKN

1. DJKN mengemukakan tujuan pemberian PMN kepada:
 - a. PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero) senilai Rp3,5 miliar berdasarkan PP No.73 tahun 2015 untuk meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha PT Antam sehingga dapat melaksanakan program hilirisasi dengan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel di Halmahera Timur serta membangun pabrik pengolahan *anode slime*.
 - b. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC)-Mandalika untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas di KEK Mandalika, yaitu berupa jalan khusus kawasan untuk event olahraga serta mendukung pelaksanaan Program PEN oleh pemerintah. Adapun rincian pemberian dana PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai berikut:

Dasar Hukum	Nilai (Rp miliar)
PP Nomor 116 tahun 2015	250
PP Nomor 6 tahun 2020	500
PP Nomor 112 tahun 2021	470

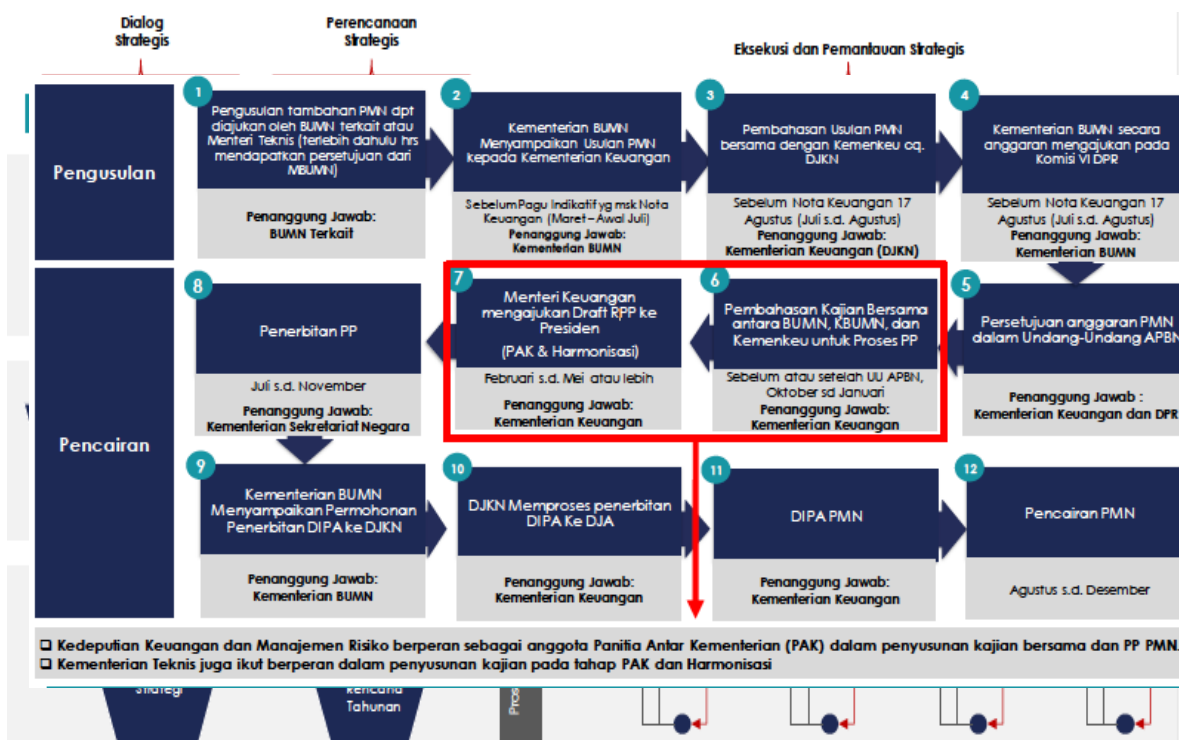
PMN TA 2021 digunakan untuk pengembangan pariwisata Tana Mori.

<u>Deskripsi</u>	<u>Alokasi</u>
Pembangunan <u>Infrastruktur Dasar di Kawasan Pariwisata Tana Mori</u>	Rp 350M
Pembangunan <u>Fasilitas MICE di Kawasan Pariwisata Tana Mori</u>	Rp 120M
<u>Jumlah</u>	Rp 470M

- c. PT Pupuk Indonesia (Persero) agar memperbaiki kinerja PT PIM dengan alasan:
 - 1). PT PIM memiliki PSO memasok pupukurea bersubsidi rayon Aceh, Sumut, Riau, Kep.Riau dan Sumbar sehingga keberlangsungan hidup PT PIM sangat dibutuhkan.
 - 2). Kondisi kedua pabrik PT PIM masih cukup baik dan handal sehingga masih memiliki prospek yang baik
 - 3). Ketersediaan gas, baik dari blok A, tail gas maupun receiving terminal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan PT PIM sampai beberapa tahun kedepan.
2. Berdasarkan hasil temuan BPK RI atas PMN yang diberikan kepada BUMN dan badan hukum lainnya maka tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak DJKN dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada perusahaan dan badan hukum lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi penggunaan dana PMN.

Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN

1. Kebijakan perencanaan, pelaporan keuangan dan monitoring



- Mekanisme pengusulan dan pencairan PMN Tunai berdasarkan PMK No.218 tahun 2020 dan PMK No.146 tahun 2022.
- Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedeputusan Bidang Keuangan dan Manajemen resiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN dibawah pembinaan Kementerian BUMN. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN.
- Dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, aspek legal, aspek operasional dan aspek manajemen resiko. Berdasarkan evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan.

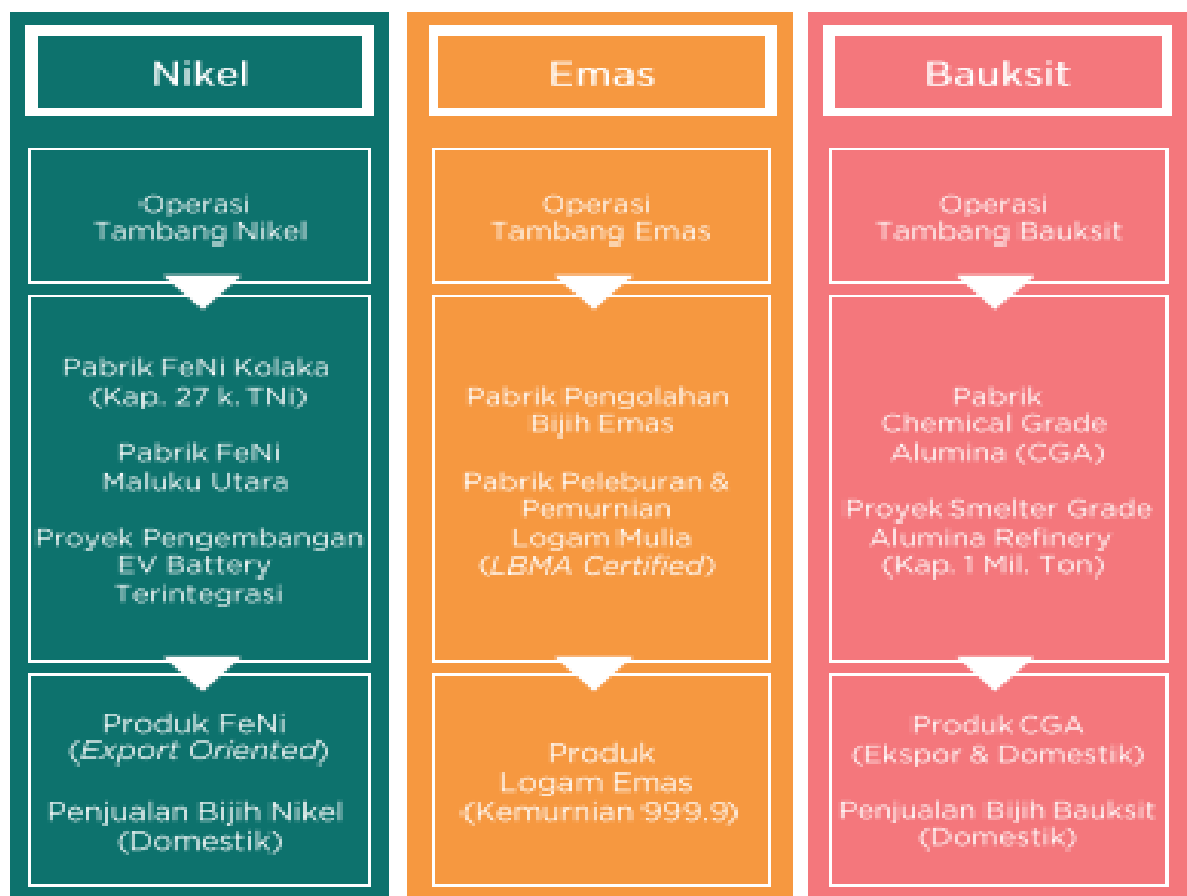
PT Aneka Tambang, Tbk (Persero)

- Dampak pemberian PMN terhadap kinerja perusahaan antara lain:
 - Sisi Operasional.
 - Meningkatkan nilai tambah cadangan dan sumber daya mineral yang dimiliki Perseroan melalui pembangunan pabrik pengolahan mineral.
 - Meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan feronikel Perseroan. Saat ini PT ANTAM telah memiliki dan mengoperasikan pabrik feronikel dengan

kapasitas terpasang 27.000 ton dan akan meningkatkan kapasitas total produksi feronikel tahunan hingga mencapai 40.500 ton.

Sisi Keuangan.

- a. Meningkatkan skala bisnis dan daya saing usaha Perseroan.
 - b. Meningkatkan pangsa pasar Perseroan di pasar domestic dan ekspor.
 - c. Potensi peningkatan pendapatan Perseroan melalui peningkatan kapasitas produksi.
 - d. Memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Portofolio PT ANTAM yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan komoditas yang terdiversifikasi berbasis nikel, emas dan bauksit disajikan dalam tabel dibawah ini.



PT Pupuk Indonesia

1. Alokasi dan realisasi pupuk bersubsidi tahun 2019 sd 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Jenis Pupuk	2019				2020				2021				2022			
	Alokasi	Realisasi	%	HET	Alokasi	Realisasi	%	HET	Alokasi	Realisasi	%	HET	Alokasi	Realisasi	%	HET
Urea	3.825.000	3.690.215	96%	1.800	4.025.467	3.970.720	99%	1.800	4.166.669	3.501.114	84%	2250	4.114.449	3.975.316	97%	2250
SP-36	779.000	772.322	99%	2.000	600.000	590.258	98%	2.000	500.000	382.042	76%	2400	182.839	177.257	97%	2400
ZA	996.000	968.579	97%	1.400	850.000	818.910	96%	1.400	720.000	676.611	94%	1700	239.367	234.540	98%	1700
NPK	2.326.000	2.308.689	99%	2.300	2.688.000	2.679.255	100%	2.300	2.724.000	2.673.505	98%	2300	2.969.339	2.916.274	98%	2300
Organik	948.000	741.623	78%	500	720.000	647.748	90%	500	649.178	512.445	79%	800	258.294	253.736	98%	800
NPK Formula Khusus (Kakao)				3.000	17.000	8.982	53%	3.000	17.000	14.895	88%	3.300	12.002	11.815	98%	3300
Total	8.874.000	8.481.428	96%		8.900.467	8.715.873	98%		8.776.847	7.760.612	88%		7.776.290	7.568.938	97%	
Organik Cair									500.000	195.669	39%	20.000	88.269	78.058	88%	20.000

2. Mekanisme e-RDKK dilakukan oleh Kementerian Pertanian, namun sejak tahun 2022 mekanismenya berubah menjadi e-Alokasi sehingga PIHC mendapatkan data e-Alokasi tersebut. Adapun kendala implementasi e-Alokasi antara lain:
- Lambat, penyampaian e-Alokasi perlu tanda tangan ditingkat kabupaten. Kondisi di lapangan tidak semua kabupaten menyampaikan alokasi, sehingga tidak semua DIPA bisa disalurkan.
 - Tidak terintegrasinya sistem Kementan dan Kartu Tani menyebabkan lebih salur.
 - Kurangnya sosialisasi penerima subsidi (tata cara masuk poktan, informasi jumlah alokasi, bagaimana agar masuk RDKK).
3. PT Pupuk Indonesia telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan pupuk bersubsidi antara lain dengan BARESKRIM dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui Kesepakatan Bersama mulai tanggal 16 Juni 2021 serta bekerja sama dengan Kejaksaan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui Nota Kesepahaman mulai tanggal 6 Januari 2022.

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menyampaikan beberapa manfaat penambahan PMN.
- Bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
 - Memperkuat struktur modal dan kapasitas usaha.
 - Menaikkan kapasitas produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja.
 - Bagi Pemerintah
 - Jumlah perpuatran uang saat WSBK 2022 lebih kurang Rp24,38 miliar dan MotoGP 2022 lebih kurang Rp697,88 miliar.
 - Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat atas pengembangan dan pembangunan MICE, infrastruktur kawasan Golo Mori.

2. Capaian dan rencana PMN ITDC tahun 2015 sd 2023 disajikan dalam tabel berikut.

	2015	2020	2021	Pengajuan 2023*
Kategori PMN	Penugasan Pemerintah	Penugasan Pemerintah	Penugasan Pemerintah	Penugasan Pemerintah
Lokasi	KEK Mandalika	KEK Mandalika	Golo Mori Manggarai Barat	KEK Mandalika
Nilai	Rp 250 Miliar	Rp 500 Miliar	Rp 470 Miliar	Rp 1,05 Triliun
Objek Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Jalan • Penataan lagoon • Utilitas Bawah Tanah • Pengolahan Air dan Limbah • Fasilitas Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Konstruksi Jalan Kawasan Khusus (JKK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur Dasar • Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Fasilitas MICE Bertaraf internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan dalam penyelesaian penugasan pengembangan dan pembangunan KEK Mandalika

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko (KMR) Kementerian BUMN yaitu sebagai berikut.

1. Dalam hal penguatan tata kelola PMN berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan antara lain PT BPUI, Pt Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC dan PT Waskita Karya.
2. Kedeputian KMR BUMN dalam upaya memperbaiki tata kelola penggunaan tambahan PMN pada BUMN melalui beberapa langkah berikut:
 - a. Memasukkan KPI PMN sesuai PMK.146/PMK.06/2022 tentang penyusunan kajian, pelaporan, pemanfaatan dan evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya ke dalam Kontrak Manajemen BUMN.
 - b. Penerbitan petunjuk teknis SK-1/DKU.MBU/02/2023 tentang evaluasi usulan tambahan PMN dari sisi administrasi dan kelayakan.
 - c. Memasukkan aturan mengenai tambahan PMN sebagai salah satu kegiatan korporasi signifikan yang diatur dalam Rangkaian Omnibus Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.
 - d. Usulan tambahan PMN dapat dilakukan verifikasi metode dan ketepatan nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Konsultan Independen.
3. Menurut PT Aneka Tambang, Tbk (Persero) untuk memberikan nilai tambah yang optimal dan realisasi atas manfaat pemberian PMN sesuai dengan rencana, diharapkan Pemerintah menetapkan kriteria kelayakan

investasi/proyek yang layak mendapatkan dana PMN serta pemberian PMN dapat diberikan juga dalam bentuk Surat Utang dengan tenor menyesuaikan timeline investasi atau proyek tersebut.

4. PT Pupuk Indonesia memberikan saran perbaikan untuk PMN agar PMN dapat diberikan untuk mendukung perusahaan-perusahaan BUMN mencapai target net zero emission di tahun 2050. Selain itu dalam konteks PI Group, PMN dapat diberikan ke salah satu anak usaha PI yang bergerak di bidang EPC kontraktor yang dapat mendukung capaian pemerintah untuk hilirisasi industri, ketahanan pangan dan dekarbonisasi.
5. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia memberikan saran untuk kebijakan PMN dimasa yang akan datang antara lain:
 - a) Penugasan pemerintah. PMN diharapkan untuk didapatkan oleh BUMN, anak BUMN dan/atau yang disetarakan dengan BUMN yang mendapatkan penugasan dan/atau mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah sehingga PMN diharapkan dapat membiayai capex dan opex sehubungan dengan PSN tersebut (utamanya disektor pariwisata/kawasan).
 - b) Pembangunan jangka panjang. Alokasi PMN untuk membiayai capex dan opex sangat sangat membantu mengingat pendapatan dari pembangunan (infrastruktur) kawasan memerlukan waktu yang panjang untuk dapat terealisasi dan optimal. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan akan terdapat *multiplier effect* bagi daerah di sekitar kawasan pariwisata maupun negara.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.
